

Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh

M Yusuf¹, Cut Yunina Eriva², Totok Rudianto³, Devi Mulia Sari⁴

Program Studi Akuntansi Sektor Publik^{1,2,4}, Politeknik Aceh

Program Studi Akuntansi³, Politeknik Aceh

amadarigoya8005@gmail.com¹, cut.eva@politeknikaceh.ac.id², totok@politeknikaceh.ac.id³,
devi@politeknikaceh.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi Anggaran, dan Akuntabilitas Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh. Pada DPRK Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRK Banda Aceh. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 25. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel Transparansi Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh. Variabel Akuntabilitas Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh. Variabel Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran Secara Simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.

Kata Kunci: *Transparansi Anggaran , Akuntabilitas Anggaran , Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh .*

I. PENDAHULUAN

Konsep pemerintahan yang baik atau *good governance* ini tidak mudah untuk diterapkan, beberapa masalahpun muncul. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah masalah anggaran. Anggaran yang dimaksud disini adalah anggaran publik. anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter mardiasmo (2021). Anggaran tersebut memiliki banyak fungsi dan salah satunya adalah sebagai alat kontrol terhadap kinerja untuk menentukan keberhasilan kinerja antara perencanaan awal dengan output yang dihasilkan. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga suatu pemerintahan dikatakan baik, jika taat pada aturan hukum yang berlaku.

Landasan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. DPRK Banda Aceh selalu berupaya untuk menciptakan konsep *good governance*, namun dalam perjalanannya tidak mudah untuk melaksanakan konsep tersebut. Termasuk di dalam tubuh sekretariat DPRK Banda Aceh yang berperan sebagai fasilitator DPRK, salah satunya adalah DPRK Banda Aceh.

Beberapa penelitian yang terkait dengan fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Garnita (2013), juga melakukan penelitian yang berjudul pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada balai besar bahan dan barang teknik di Jawa tengah), dan hasilnya

menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengukuran kinerja instansi pemerintah, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian lain yang juga membahas mengenai hubungan prinsip-prinsip *good governance* dan kinerja RAPBD yang diteliti oleh Ricky Irvan (2013) menyimpulkan bahwa secara bersama-sama penerapan prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan RAPBD.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Umar tahun 2018 dengan Judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. 2) Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. 3) Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh
2. Apakah Akuntabilitas Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap

Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.

3. Apakah Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari Proyek Akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Transparansi Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.
3. Untuk mengathui Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pengertian Transparansi Anggaran

Menurut Tanjung (2014) Transparansi Anggaran berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), Transparansi Anggaran adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi Anggaran merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi Anggaran dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryana, 2015).

Akuntabilitas Keuangan

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), Akuntabilitas Keuangan adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas Keuangan adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya, Akuntabilitas Keuangan adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi : 2015). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak

untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Tujuan Akuntabilitas Keuangan

Tujuan Akuntabilitas Keuangan adalah agar terciptanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Mekanisme Akuntabilitas Keuangan meliputi beberapa aspek yaitu siapa yang harus melakukan Akuntabilitas Keuangan, kepada siapa Akuntabilitas Keuangan ini dilakukan, untuk apa Akuntabilitas Keuangan dilakukan, dan bagaimana Akuntabilitas Keuangan ini dilaksanakan. Mekanisme Akuntabilitas Keuangan ini sangat bergantung pada kondisi dan sistem yang ada pada masing-masing instansi. Mardiasmo (2016)

Indikator Akuntabilitas Keuangan

Menurut Zeyn (2011) terdapat beberapa indikator yang terdapat dalam Akuntabilitas Keuangan, yaitu:

- a. Perumusan rencana keuangan (Proses penganggaran), yaitu pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku, pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dan pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.
- b. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, yaitu pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan adanya sumber pembiayaan yang jelas demi kelancaran kegiatan.
- c. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, yaitu kewajiban

- penghitungan capaian kinerja keuangan dan evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan pelaporan keuangan, yaitu penyelenggaraan akuntansi, laporan keuangan disampaikan kepada daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi Pemerintahan dan adanya analisis atas laporan keuangan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif sedangkan jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh transparansi anggaran, akuntabilitas keuangan terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh yang di analisis dengan menggunakan model persamaan ekonometrik dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat (Regresi Linear Berganda) yang dinyatakan sebagai berikut, (Umar, 2012: 180):

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kuantitatif yang harus membutuhkan data yang jelas dan spesifik. Menurut Sugiono (2017, 194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interviu (wawancara), kuisioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. pada teknik pengumpulan data berupa wawancara adalah akan dilaksanakan oleh peneliti dan responden seperti staf pada kantor DPRK Kota Banda Aceh. Hasil wawancara akan dilakukan peninjauan langsung pada lapangan dan kemudian akan diolah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Kuisioner adalah berupa suatu pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya tertutup atau terbuka. Kuisioner dapat diberikan langsung kepada responden ataupun dikirimkan melalui pos atau internet. Teknik pengumpulan data dalam membagikan kuisioner untuk mendapatkan responden staf guna mengetahui apakah variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Penelitian dengan metode membagikan kuisioner adalah suatu teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data, pengumpulan data ini adalah dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dengan responden pada kantor DPRK Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dengan kuisioner ini mempunyai teknik skala Likert.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan dengan minimal 2 variabel independen. Dalam penelitian ini diperoleh dua variabel independen yaitu variabel Transparansi Anggaran, dan Akuntabilitas Keuangan.

Tabel 1.
Analisis Linear Berganda

Nama Variabel	Standardized Coefficients		t hitung	t tabel	Sig.
	B	Std. Error			
Konstanta (a)	28,219	14,91	1,892	1,892	0,000
Transparansi Anggaran (X1)	0,708	0,366	2,661	2,661	0,000
Akuntabilitas Keuangan (X2)	0,415	0,399	0,717	0,717	0,000

Sumber: Edit Penulis 2023

Maka dari itu persamaan regresi yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$Y = 28,219 + 0,708 (X_1) + 0,415 (X_2) + e$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh

X1 = Transparansi Anggaran

X2 = Akuntabilitas Keuangan

e = Standar error

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diketahui bahwa: Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 28,219 hal tersebut apabila nilai variabel Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas keuangan sama dengan 1 maka nilai variabel Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh sebesar 28,219
- Koefisien regresi variabel

Transparansi Anggaran bernilai positif sebesar 0,708. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% Transparansi anggaran (X₁) maka Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y) akan meningkat sebesar 0,708. Begitu juga sebaliknya apabila terjadi Transparansi Anggaran (X₁) sebesar 1% maka akan menurunkan Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y) sebesar 0,708. Jadi Transparansi Anggaran (X₁) berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y). Hasil ini lebih diperjelas oleh kuesioner yang dijawab oleh responden yang menyatakan setuju adanya Transparansi anggaran akan meningkatkan Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh

- Koefisien regresi variabel Akuntabilitas Keuangan bernilai positif sebesar 0,415. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai 1 Akuntabilitas Keuangan (X₂) maka Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y) akan meningkat sebesar 0,415. Begitu juga sebaliknya apabila berkurang Akuntabilitas keuangan (X₂) sebesar 1 maka akan menurunkan Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y) sebesar 0,415. Jadi Akuntabilitas keuangan (X₂) berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y). Hasil ini lebih diperjelas oleh kuesioner yang dijawab oleh responden yang menyatakan setuju adanya Akuntabilitas keuangan akan meningkatkan Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.

Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh

Nilai t_{hitung} untuk variabel Transparansi anggaran (X_1) sebesar 3,694 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf (a) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k - 1$ ($38 - 2 - 1$) = 35 adalah sebesar 0,3246. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai t_{hitung} 3,694 > t_{tabel} 0,3246. Dari hasil uji hipotesis individual untuk variabel Transparansi anggaran (X_1) menunjukkan bahwa variabel Transparansi anggaran (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y). Hal ini dilihat dengan diterima nya H_{a1} dan ditolak nya H_{o1} serta nilai signifikansi X_1 sebesar 0,004 karena nilai $T_{sig} < \text{dari } 0,05 = 0,016 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi anggaran (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Garnita (2013), yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengukuran kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh

Hasil penelitian diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Akuntabilitas keuangan (X_2) sebesar 0,717, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf (a) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k - 1$ ($38 - 2 - 1$) = 35 adalah sebesar 0,3246.

Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai t_{hitung} 0,717 > t_{tabel} 0,3246. Dari hasil uji hipotesis individual untuk variabel Akuntabilitas Keuangan (X_2) berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y). Hal ini dilihat dengan diterima nya H_{a1} dan ditolak nya H_{o1} serta nilai signifikansi X_2 sebesar 0,001 karena nilai $T_{sig} < \text{dari } 0,05 = 0,001 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muljo; Heny Kurniawati (2014) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran. Hasil *analisis rank spearman correlation* mengungkapkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,339 yang artinya pengaruh hubungan rendah dan searah (karena positif). nilai koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 0,115 yang artinya variabel Akuntabilitas mempengaruhi Pengelolaan anggaran sebesar 11,5% dan sisanya 88,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh.

Hasil uji hipotesis simultan untuk variabel Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y) sebesar 3,838. sedangkan nilai f_{tabel} dengan taraf (a) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k$ ($38 - 2$) = 36 adalah sebesar 0,329. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak karena nilai f_{hitung} 3,838 > f_{tabel} 0,329. Dari hasil uji hipotesis simultan untuk variabel Transparansi Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas keuangan (X_2) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y). Hal ini karena digambarkan dengan diterimanya H_{a3} di tolaknya H_{o3} serta nilai signifikansi Y sebesar 0,000 karena nilai $F_{sig} < \text{dari } 0,05 = 0,016 > 0,05$. Hasil ini mendukung

hipotesis ketiga (Ha3), karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh > 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Umar tahun 2018 dengan Judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. 2) Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi Anggaran (X_1) menunjukkan bahwa variabel Transparansi Anggaran (X_1) berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel Pengelolaan Dana DPR Kota Banda Aceh (Y).
2. Akuntabilitas keuangan (X_2) menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas keuangan (X_2) berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel Pengelolaan Dana DPR Kota Banda Aceh (Y)..
3. Transparansi Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas keuangan (X_2) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pengelolaan Dana DPRK Banda Aceh (Y)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim, dan Syukriy Abdullah (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi pemerintah. Vol 2.
- Zeyn, Elvira (2011), *Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah* melalui Website di Yogyakarta. Vol VII, No 1, Hal. 61-78
- Arif Widyatama, dkk (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*, Jurnal: BAKI, Volume 2, Nomor 2.
- Arim Nasim & Muhammad Rizqi Syarhi Romadhon (2014). *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pengelolahan Zakat dan Sikap Pengelola Terhadap kepercayaan Muzzaki*, Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Vol, 2, No3.
- Baiq Nurrizkianan, dkk (2017). *Determinasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholder*. Jurnal: Akuntansi dan Investasi, Vol 18, No.1
- Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Lipi Press. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. (Accesed: 26 September 2022)
- Harun Al Rasyid, (2011), *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

- Indra Bastian, Nov (2011), *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Jones, Rowan. et.all (2010), *Public Sector Accounting*, 5th Ed,London: Pitman Publishing.
- Jurnal *Administrasi Publik* (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 101-109 | 109.
- Mardiasmo, (2016), *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan*, Vol 10, No 1, Hal 58.
- Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)*. e-Journal Vol. 2, No. 1. Hal. 1-12
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah/ PERMENDAGRI 21 thn 2011 Perubahan Kedua PERMENDAGRI 13 tahun 2006*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Accesed: 25 September 2022)
- Schiavo-Campo, S., and Tomasi, D., (2013), *Managing Government Expenditure*, Asia Development Bank, Manila
- Singarimbun, Masri., Soffian Effendi, (2015), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Sukmanigrum. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. Skrikpsi Akuntansi*. Universitas Diponegoro. Semarang. Wilopo, Indra Agung. (2017).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah (Internet)* (Accesed: 27 September 2022)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Accesed: 26 Sep 2022)